

**EVALUASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERHADAP
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KOTA
PEKANBARU PROVINSI RIAU**

DHIO ALF FAJAR YEFRI

NPP 30.0230

KELAS D5

*Asdaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

ABSTRACT

Background: Dhio Alf Fajar Yefri, "Evaluation of Forest and Land Fire Prevention on the Performance of the Regional Disaster Management Agency in Pekanbaru City, Riau Province". **Purpose:** The purpose of this study was to determine the evaluation of forest and land fire prevention on the performance of the Pekanbaru City Regional Disaster Management Agency, Riau Province, to determine the efficiency of using existing infrastructure in preventing forest and land fires. Fire in Pekanbaru City by the Regional Disaster Management Agency of Pekanbaru City of Riau Province to find out the adequacy of the budget in tackling forest and land fires in Pekanbaru City by the Regional Disaster Management Agency of Pekanbaru City of Riau Province to find out the equity carried out by the Regional Disaster Management Agency of Pekanbaru City of Riau Province in handling forest and land fires in the city of Pekanbaru, Riau Province, knowing the response in overcoming forest and land fires in the city of Pekanbaru by the Regional Disaster Management Agency, Pekanbaru City, Riau Province, knowing the right time to prevent forest and land fires in the city of Pekanbaru, by the Regional Disaster Management Agency, Pekanbaru City, Province Riau. **Method:** This study used a qualitative method with a descriptive approach and collected data through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is an inductive analysis technique. **Results/Findings:** The research results obtained were that the Head of the Data and Information Section of the Regional Disaster Management Agency, Pekanbaru City, Riau Province, and their staff had carried out according to applicable procedures, trying to provide the best possible community service in the forest. and prevention of land fires. The Regional Disaster Management Agency, Pekanbaru City Regency, Riau Province carries out its main duties and functions in preventing forest and land fires, providing counseling to school children about the importance of fire prevention and the consequences of the fire itself. **Conclusion:** This performance is driven by the dimensions of public policy evaluation theory William, N. Dunn (1999) and is measured by indicators from these dimensions. The dimensions of organizational effectiveness theory that the authors use include effectiveness, efficiency, adaptability, fairness, accountability, and accuracy.

Keywords: Evaluation, Forest and Land Fire Prevention, Performance, BPBD

ABSTRAK

Latar Belakang: Dhio Alf Fajar Yefri, “Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk mengetahui efisiensi penggunaan infrastruktur yang ada dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran di Kota Pekanbaru oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk mengetahui kecukupan anggaran dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau mengetahui pemerataan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kota Pekanbaru Provinsi Riau mengetahui respon dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kota Pekanbaru oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahu waktu yang tepat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di kota Pekanbaru oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh adalah Kepala Bagian Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau beserta jajarannya telah melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, berusaha memberikan pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya di hutan. dan pencegahan kebakaran lahan. Dimana salah satu kinerja atau upaya yang dilakukan oleh BPBD adalah sosialisasi terkait pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Pekanbaru Provinsi Riau menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, memberikan penyuluhan kepada anak sekolah tentang pentingnya pencegahan kebakaran dan akibat dari kebakaran itu sendiri. **Kesimpulan:** Kinerja ini didorong oleh dimensi-dimensi teori evaluasi kebijakan publik William, N. Dunn (1999) dan diukur dengan indikator-indikator dari dimensi-dimensi tersebut. Dimensi teori efektivitas organisasi yang penulis gunakan meliputi efektivitas, efisiensi, adaptabilitas, keadilan, akuntabilitas, dan akurasi.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan, Kinerja, BPBD*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan dua musim: musim kemarau dan musim penghujan. Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi dan beragam karena iklimnya yang tropis. Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta melindungi dirinya sendiri dari bahaya dan bencana. Pemerintah harus memiliki model perlindungan penanggulangan bencana yang efektif. Salah

satu bencana alam yang tidak wajar adalah kebakaran hutan/lahan. Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah utama hutan dan lingkungan dan telah menjadi perhatian lokal dan global. Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa di mana kebakaran terjadi baik secara alami maupun akibat perbuatan manusia, yang ditandai dengan meluasnya api secara bebas dan konsumsi bahan bakar hutan dan lahan di sepanjang jalurnya

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Riau disebabkan oleh faktor yang disengaja maupun tidak disengaja, mulai dari faktor suhu yang sangat panas pada musim kemarau hingga faktor kesengajaan seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial terhadap pembangunan berkelanjutan karena efek langsungnya terhadap ekosistem, kontribusinya terhadap emisi karbon, dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Faktor lain adalah kurangnya prasarana untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki BPBD kota Pekanbaru, serta masalah lain seperti jarak tempuh menuju lokasi kebakaran dan kurangnya anggaran baru untuk BPBD untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Tercapainya kinerja setiap indikator program menjadi tolak ukur keberhasilan BPBD Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait kebencanaan di daerah. Berdasarkan uraian permasalahan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka dapat diambil menjadi latar belakang pentingnya untuk membahas **"Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau"**.

1.2 Kesejangan Masalah Yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan ini yaitu adanya bencana kebakaran hutan, dimana pada penelitian kali ini ingin memperdalam bagaimana evaluasi yang diberikan oleh BPBD Kota Pekanbaru dalam mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu juga bagaimana hasil dari kinerja BPBD dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan, selain itu juga kecukupan anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota Pekanbaru oleh BPBD Kota Pekanbaru. Dalam menangani kebakaran hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (RBMD) menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, namun demikian, meskipun kurangnya fasilitas infrastruktur, BPBD kota Pekanbaru siap untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan koordinasi pemerintahan daerah sebagai referensi atau perbandingan untuk dijadikan sebagai acuan. Peneliti Muhammad Fiqra. S “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dimana Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari terhambatnya BPBD dalam mengakses lokasi bencana kebakaran hutan. Selain itu sarana dan prasarana yang digunakan dalam mitigasi bencana jumlahnya masih sedikit. Peneliti Sri Rampita Dewi (2020) “Peran BPBD Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Di Kabupaten Kampar” menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Dengan hasil bahwa pengendalian Kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD tidak efektif dalam mensosialisasikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hal ini dapat dilihat meningkatnya Kebakaran hutan dan lahan 4 tahun belakangan. Upaya telah diupayakan BPBD Kabupaten Kampar namun terdapat berbagai kendala. Peneliti Chandra Yudiana Effendi (2012) “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tahun 2012”, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil produktifitas kinerja BPBD Kabupaten Bandung sudah cukup baik, kemudian kualitas layanan kinerja BPBD Kabupaten Bandung cukup baik dilihat adanya fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta adanya diklat kepada aparatur dan masyarakat. Kemudian responsivitas dan tanggungjawab BPBD Kabupaten Bandung cukup baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian yang berbeda dimana akan meneliti tentang bagaimana evaluasi pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada kinerja BPBD Kota Pekanbaru.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kinerja pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk mengetahui efisiensi pendayagunaan sarana prasarana yang ada dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di kota Pekanbaru oleh badan penanggulangan bencana daerah kota Pekanbaru. Serta

Agar dapat mengetahui pemerataan yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota Pekanbaru.

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis mengkombinasikan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengamati dan selanjutnya mempelajari dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Dengan metode ini, penulis akan mendeskripsikan Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Gambaran umum lokasi Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi kondisi geografis, demografis, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan melihat kondisi tersebut maka dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Kota Pekanbaru Keadaannya Relatif daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam.

3.2 Gambaran Umum Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang berjudul "Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau". Penelitian ini menggunakan dimensi evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (1999), dan indikatornya digunakan untuk mengukur dimensi tersebut. Penulis menggunakan berbagai teori tentang efektivitas organisasi, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik, analisis Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dijelaskan di sini.

3.2.1 Efektivitas Hasil Dari Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menangani kebakaran hutan dan kebakaran di Provinsi Riau. Untuk mencapai tujuan organisasi, setiap anggota dan karyawan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tugas-tugas ini harus dirancang dengan baik dan didefinisikan dengan jelas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kinerja yang baik dari badan penanggulangan bencana daerah diperlukan agar kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Provinsi dan kabupaten/kota mulai membuat kebijakan, strategi, dan operasional penanggulangan bencana sesuai dengan arah kebijakan nasional..

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli dan menyarankan kepada pemilik perkebunan dan lahan untuk memiliki kanal yang mengelilingi mereka untuk mengurangi resiko kebakaran. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga sering mengadakan sosialisasi ke sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak kebakaran. Penyebaran kebijakan ke daerah dari tingkat nasional seringkali tidak mencukupi dan memakan waktu, dan pendekatan yang digunakan hanya berfokus pada kebakaran hutan dan lahan. Sangat penting untuk menekankan bahwa, karena kebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang melibatkan berbagai sektor dan lintas sektor, kebijakan yang dibuat dan diterapkan harus sesuai dengan kebijakan di sektor lain.

3.2.2 Efisiensi Pendayagunaan Sarana Prasarana Yang Ada Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau petugas-petugas bagian lapangan menggunakan alat untuk bekerja, sarana prasarana menjadi pendukung agar berjalan lancarnya suatu kegiatan dilapangan. Seperti mobil berisi air yang dipergunakan untuk memadamkan api, namun apabila kondisi dilapangan jalanan sempit kami hanya membawa selang air yang panjang. Ada juga sarana dan prasarana umum meliputi peralatan peringatan dini kondisi dan kemampuan Daerah posko bencana dan peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset alat penerangan kantong-kantong mayat.

Untuk memenuhi kebutuhan lapangan seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, angin puting beliung, dan keadaan bencana lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau memiliki sarana dan prasarana yang bertujuan untuk membantu dalam proses pencegahan maupun kegiatan evakuasi.

3.2.3 Kecukupan Anggaran Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota

Pekanbaru Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat. Anggaran memiliki fungsi dalam organisasi sektor public terutama pemerintahan. Ketersediaan anggaran menjadi faktor yang sangat penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penanggulangan bencana menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar, sehingga seharusnya mendapatkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya. Awalnya memang anggaran kadang juga tidak cukup. Tetapi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan semua bisa teratasi dengan baik.

Pengeluaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah meningkatkan alokasi anggaran, sementara dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Pemerintahan Kota Pekanbaru masih terbatas. Ini berdampak negatif pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekanbaru karena insiden bencana semakin meningkat. Tetapi pada akhirnya, semua juga bisa teratasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekanbaru membutuhkan anggaran. Anggaran mengacu pada persiapan program. Oleh karena itu, program yang direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru harus sesuai dengan visi misi, tugas pokok, dan fungsi. Dengan demikian, anggaran dapat disusun dan disetujui sesuai dengan pertanggungjawaban anggaran.

3.2.4 Pemerataan Yang Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Pemerataan adalah saat semua orang mendapatkan hal-hal yang dibutuhkannya sesuai dengan tingkat kebutuhan individu masing-masing. Pemerataan dalam bidang BPBD jadi sangat penting karena pelayanan pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga harus didistribusikan secara adil dan merata. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kota Pekanbaru Provinsi Riau selalu melakukan pemerataan kepada semua masyarakat yang membutuhkan bantuan dari BPBD, dimana sebagai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selalu cepat tanggap terhadap bencana-bencana yang ada, misalnya adanya kebakaran atau bencana angin puting beliung, kami akan membantu secara sigap.

3.2.5 Responsivitas Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam hal responsivitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru telah memenuhi standar. Selain itu, pernyataan masyarakat mendukung gagasan bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat sangat cepat merespon dan langsung terjun ke lapangan jika ada laporan kebakaran. Di setiap Kecamatan Kota Pekanbaru, ada operator yang terus memberikan informasi. Jika ada kebakaran, operator langsung melaporkannya ke Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Pekanbaru, yang kemudian mengirim anggota ke lokasi kebakaran.

Daya tanggap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bisa dikatakan sangat cepat merespon dan langsung terjun kelapangan jika ada laporan adanya titik api.

3.2.6 Ketepatan Waktu Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Rekonstruksi daerah bencana dan pembangunan kembali sapsras adalah dua program BPBD yang berfokus pada pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang dan sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan. Program-program ini telah dilaksanakan bersama dengan pihak-pihak yang terkait dan mencakup sosialisasi bahaya kebakaran hutan dan lahan serta dampak yang terjadi, serta evaluasi dan observasi pasca bencana. Dengan memastikan bahwa program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan tepat waktu dan secara merata kepada BPBD dapat menjamin bahwa program-program tersebut dilaksanakan dengan baik dan secara merata.

3.3. DISKUSI TEMUAN UTAMA PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti mendalami hambatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara terus menerus terutama di kota pekanbaru. Dalam hal ini peneliti mendalami dari hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tujuan yang sama.

IV. KESIMPULAN

1. Kepala Bidang Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau beserta stafnya sudah melakukan kinerja

sesuai prosedur yang berlaku, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dimana salah satu kinerja atau usaha dilakukan BPBD yakni sosialisasi terkait betapa pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau memiliki sarana dan prasarana yang bertujuan membantu dalam proses pencegahan maupun kegiatan evakuasi dalam proses penanggulangan bencana di lapangan. Sarana prasarana dibutuhkan untuk menimalisir tugas pokok dan fungsi dari peran BPBD berdasarkan kebutuhan dilapangan.
3. Ketepatan waktu dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dimana program-program yang dilakukan BPBD akan dilaksanakan dengan baik dan akan dilakukan secara merata kepada masyarakat.
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kota Pekanbaru Provinsi Riau selalu melakukan pemerataan kepada semua masyarakat yang membutuhkan bantuan dari BPBD

Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam menanggulangi kebakaran lahan yaitu kurangnya anggaran yang ada di kota pekanbaru untuk mengatasi permasalahan penanggulanagan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Arah masa depan penelitian

Diharapkannya penelitian ini dapat menjadikan suatu refrensi pemerintah kota pekanbaru untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di kota pekanbaru.

V. SARAN

Dalam pelaksanaan Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah memerlukan adanya konsistensi serta komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga kinerja BPBD semakin bisa diitngkatkan. Perlu adanya penambahan anggaran sehingga BPBD bisa menjalankan program-programnya dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan bisa teratasi dengan baik serta BPBD Kota Pekanbaru sebaiknya lebih sering melakukan sosialiasai kepada masyarakat khususnya yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan juga

membagikan pamflet atau memasang spanduk tentang bahayanya membakar hutan dan lahan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Pamuladi. 1999. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*.

Cetakan 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Burhan Bugin. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Suwatno dan Donni Juni Priansa 2014. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik*

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Yatim Riyanto. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

B. JURNAL

Lestari, R. J. S. 2015. Cover Jurnal Sylva Lestari Vol 3. No. 1, Januari 2015. Jurnal Sylva Lestari, 3(1).

Tiwi Chandya. *Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ketapang*. Journal of Government and Political Studies. Volume 4 - NO. 1 – April 2021 P-ISSN: 2614-2120 E-ISSN: 2614-2104

Pasaribu, S. M., & Friyatno, S. 2008. *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat*. SOCA (SOCIO-ECONOMIC OF AGRICULTURE AND AGRIBUSINESS), 8(1)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana alam

Pertaturan Daerah Provinsi Riau No. 7 Tahun 2019 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

